

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM  
MENUNJANG PERBAIKAN EKONOMI MASYARAKAT  
DI KELURAHAN TLOGOMAS 2022**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



**OLEH:  
ISA ALVIONITA JULIET  
2019210215**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi  
MALANG  
2023**

Isa Alvionita Juliet, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, 2023

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM  
MENUNJANG PERBAIKAN EKONOMI MASYARAKAT DI KELURAHAN  
TLOGOMAS TAHUN 2022**

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Willy Tri Hardianto, S.Sos., MM., M.AP

Dosen Pembimbing Pendamping : Dr. Asih Widi Lestari., S.AP., M.AP

---

RINGKASAN

Tujuan penelitian ini untuk melihat PKH dalam mendukung peningkatan moneter daerah di Kelurahan Tlogomas pada tahun 2022 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam tinjauan ini, ilmuwan menggunakan strategi metodologi subjektif, dalam menentukan sumber spesialis menggunakan pemeriksaan purposif, prosedur pengumpulan informasi yang digunakan oleh analis adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, dan dalam memecah informasi menggunakan pengurangan informasi, tampilan informasi dan membuat keputusan. Konsekuensi dari peninjauan Keberlangsungan Program Kepercayaan Keluarga dalam Mendukung Peningkatan keuangan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Tlogomas Tahun 2022 dapat dikatakan sangat kuat, yang mana dapat dilihat dari pemeriksaan yang mengungkapkan bahwa perekonomian daerah setempat semakin berkembang selanjutnya. untuk mendapatkan bantuan PKH. Terdapat komponen pendukung kelangsungan PKH dalam mendukung peningkatan keuangan daerah di Kota Tlogomas, yaitu terdapat kerjasama yang baik oleh seluruh pihak dalam pendistribusian PKH. Faktor-faktor yang menekan adalah keterlambatan dalam mendapatkan informasi baru, kesalahan dalam karakter daerah, dan jumlah bantuan yang sedikit yang tidak sebanding dengan masyarakat miskin.

Kata kunci: Kemiskinan, PKH, Ekonomi masyarakat

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar belakang**

Kemiskinan ialah masalah sosial yang terjadi di negara-negara non-industri, salah satunya Indonesia. Secara umum, kemiskinan yaitu suatu kondisi di mana seseorang atau suatu kelompok belum dapat memenuhi kebebasan fundamentalnya untuk menjalankan dan mengembangkan kehidupan bernegara. Angka kemiskinan masyarakat di Indonesia setiap tahunnya seolah tidak berkurang terlebih lagi setelah adanya pandemi covid-19. Kemiskinan bahkan menyebabkan timbulnya masalah sosial lain seperti rendahnya tingkat pendidikan dan bahkan kriminalitas. Pola kemelaratan terus terjadi karena gaji masyarakat yang rendah dan membuat masyarakat tidak dapat mengakses fasilitas pendidikan, kesehatan dan gizi yang baik sehingga menyebabkan kualitas SDM dari segi akademik dan fisik menjadi rendah sehingga berdampak pada rendahnya efisiensi. Kemiskinan merupakan persoalan publik yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah dan pendekatan penanganan yang tepat, terkoordinasi dan menyeluruh, untuk mengurangi beban dan menghilangkan kebebasan-kebebasan esensial penduduk secara tepat melalui perbaikan yang komprehensif, adil dan dapat didukung untuk memahami kehidupan yang terhormat.

Untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, pemerintah telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial, salah satunya Program Perwalian Keluarga (PKH). Mitigasi kemiskinan adalah rencana dan proyek pemerintah dan pemerintah provinsi yang dilakukan dengan sengaja, terorganisir dan bekerja sama dengan dunia usaha untuk mengurangi jumlah orang yang membutuhkan untuk meningkatkan tingkat bantuan pemerintah daerah. Program pengentasan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk berupaya memberikan bantuan pemerintah kepada masyarakat miskin melalui bantuan kemanusiaan, penguatan wilayah, penguatan organisasi keuangan kecil dan kecil, serta berbagai proyek untuk meningkatkan pergerakan keuangan. Prosedur untuk mempercepat penurunan kemiskinan dilakukan dengan cara:

1. Mengurangi biaya klasifikasi malang
2. Memperluas kapasitas dan upah pada klasifikasi individu yang kurang beruntung
3. Menciptakan dan menjamin daya dukung perusahaan mini dan swasta
4. Mensinergikan pendekatan dan proyek pengurangan kemiskinan

Program Pemerintah dan Keluarga Harapan merupakan salah satu inisiatif yang didukung oleh wajib pajak untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan pendapatan terbatas kepada keluarga dan masyarakat miskin dan rentan, yang dikoordinasikan melalui program untuk membantu masyarakat miskin yang hidup berdasarkan bantuan pendapatan. Untuk mempercepat

pengentasan kemiskinan di Indonesia, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan PKH sejak tahun 2007. Program asuransi sosial yang juga biasa dikenal dengan Conditional Cash Transfer (CCT) ini terbukti berhasil mengentaskan kemiskinan di negara-negara dengan permasalahan kemiskinan yang berkepanjangan. Sebagai program bantuan pendapatan bersyarat, PKH membuka kesempatan bagi keluarga miskin, khususnya ibu hamil dan anak, untuk memanfaatkan berbagai layanan kesehatan dan kantor pengelola sekolah (fasdik) di sekitar mereka. Subsidi PKH juga akan didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan menyesuaikan besaran bantuan pendapatan nasional sesuai konstitusi dan amanat pemimpin Nawacita Republik Indonesia. Melalui PKH, atau disingkat KM, keluarga miskin didorong untuk melakukan pendekatan dan memanfaatkan layanan sosial dasar seperti kesejahteraan, pendidikan, pangan dan penghidupan, perawatan dan bantuan, termasuk partisipasi dalam berbagai program dukungan sosial lainnya yang merupakan proyek terpadu yang berkesinambungan. PKH dikoordinasikan sebagai titik fokus dan fokus pelayanan terhadap pengurangan kemiskinan, mensinergikan berbagai program penguatan masyarakat dan jaminan sosial. Misi besar PKH adalah mengentaskan kemiskinan yang semakin nyata mengingat pada September 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sebesar 9,71% dari total penduduk atau 26,50 juta jiwa (BPS, 2021).

PKH sendiri diharapkan dapat memberikan kontribusi yang mendasar dalam mengurangi jumlah masyarakat miskin, memperkecil kesenjangan yang

ada (proporsi gini) sekaligus memperluas File Peningkatan Manusia (IPM). Implikasi dari penelitian lain menunjukkan bahwa PKH mempengaruhi perubahan penggunaan keluarga, seperti di beberapa negara lain di mana CCT diterapkan. PKH menang dengan meningkatkan penggunaan keluarga angkat Indonesia sebesar 4,8%.

Pejabat Pengamatan, Penilaian dan Pengendalian Peningkatan pada Pelayanan Perencanaan Pembangunan Umum, Taufik Hanafi menuturkan, informasi bantuan administrasi sementara ini belum semuanya bergabung, karena masih ada 4 kesulitan yang harus diatasi. tampak mengkoordinasikan informasi. “Sebagian kesulitan besar yang kita hadapi dimulai dari adanya kekuatan untuk tidak kuatnya normalisasi informasi bantuan pemerintah,” dalam FGD Kerangka Data Aset Bantuan Pemerintah yang Terkoordinasi, Senin (1/3/2021). 2021). Jadi banyak sekali informasi yang kurang, NIK yang tidak memadai, penerima bantuan yang tidak ikut NIK, dan tidak adanya penyegaran informasi mengenai wilayah kependudukan dan status pekerjaan. penerima bantuan benar-benar mencakup, misalnya ada keluarga yang mendapat sembako normal dan ada tambahan sembako, kemudian ada beberapa NIK dalam 1 keluarga yang mendapat bantuan serupa. Ketiga, komponen konfirmasi dan persetujuan belum terkoordinasi dengan sempurna sehingga masih terjadi duplikasi informasi, salinan NIK yang sama dipakai oleh lebih dari satu orang penerima bantuan (Liputan6.com).

Peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Tlogomas karena di tempat tersebut terdapat masalah yang ingin diteliti oleh peneliti. Dimana kemiskinan tidak kunjung berkurang karena dalam penyaluran PKH masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan efektivitas PKH tidak sepenuhnya baik. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi awal dan sedikit berbincang dengan salah satu perangkat Kelurahan Tlogomas yang mengatakan bahwa kendala efektivitas PKH dalam menunjang perbaikan ekonomi masyarakat terletak pada jumlah masyarakat miskin yang lebih banyak dari kuota PKH untuk kelurahan Tlogomas, selain itu adanya keterlambatan *update* data yang menyebabkan tidak tepatnya sasaran bantuan PKH secara menyeluruh. Maka peneliti mengambil judul “EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENUNJANG PERBAIKAN EKONOMI MASYARAKAT DI KELURAHAN TLOGOMAS TAHUN 2022”

### **1.1. 1.2 Rumusan masalah**

Rumusan masalah yang dipakai ialah:

1. Bagaimana efektivitas bansos (PKH) untuk menunjang perbaikan perekonomian masyarakat di Kelurahan Tlogomas?
2. Apa faktor pemungkin dan penghalang (PKH) demi menunjang perbaikan perekonomian masyarakat?

## **1.2. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian yaitu :

2. Guna meninjau efektivitas bansos (PKH) dalam menunjang perbaikan perekonomian masyarakat di kelurahan Tlogomas.
3. Guna melihat faktor-faktor yang menjadi pemungkin dan penghalang (PKH) dalam menunjang perbaikan ekonomi warga

### **3.1. 1.3 Manfaat Penelitian**

Dari Uraian diatas maka peneliti ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam penelitian ini:

#### **1. Manfaat Praktis**

Bermanfaat bagi kelurahan Tlogomas yang dapat memberikan masukan terhadap PKH dalam menunjang perekonomian masyarakat

#### **2. Manfaat Akademis**

Dapat menyumbang pemikiran dan pengetahuan dalam bidang pelayanan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Gibson L, dkk.1985. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Edisi 5 Jilid 1. Erlangga. Jakarta.
- Pasalong Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ruslan, Rosady. 2006. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi : Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sidiq U, Choiri M M. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. Ponorogo* : CV Nata Karya.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi Kaidah Perilaku (Alih Bahasa Magdalena)*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV

### PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (Online), ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)), diakses pada 28 November 2022.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (Online), ([peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id)), diakses pada 28 November 2022
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (Online), ([peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id)), diakses pada 28 November 2022
- Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kota Malang. (Online), (<https://jdih.malangkota.go.id>), diakses pada 22 November 2023

### INTERNET

- Abizal, N., Maimun., Yulindawati. 2022. *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya)*, 1 (1). (Online), (<https://doi.org/10.22373/jibes.v1i1.1576>) diakses 27 November 2022

- Beni. S., Manggu B. 2020. *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Perbatasan (Studi Kasus Kecamatan Jgoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat)*, 9 (2). (Online), (<https://doi.org/10.22373/jibes.v1i1.1576>) diakses 27 November 2022
- BPS. 2022. *Badan Pusat Statistik*, (Online), ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) diakses 18 September 2022
- Domri. D., Ridwan.R., Jaya.M. 2019. *Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, 1(1). (Online), (<https://doi.org/10.36355/jppd.v1i1.1>) diakses 27 November 2022
- Habib, MAF. 2021. *Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif*, 1(2), (Online), (<https://doi.org/10.36355/jppd.v1i1.1>) diakses 27 November 2022
- Infitah. N., Sukidin., Hartanto. W. 2018. *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sumber Kejayaan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember*, 13(2). (Online), (<https://doi.org/10.36355/jppd.v1i1.1>) diakses 27 November 2022
- Muin R, Rosdiana R. 2020. *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerima Bantuan Di Desa Lliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar*, 5 (2). (Online), (<https://doi.org/10.36355/jppd.v1i1.1>) diakses 27 November 2022
- Najidah N, Lestari H. 2019. *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang Kota Semarang*, 8 (2). (Online), (<https://doi.org/10.36355/jppd.v1i1.1>) diakses 27 November 2022
- Liputan 6. 2021. *4 Hambatan yang Bikin Integrasi Data Bansos Tak Mulus*. ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)) diakses pada 19 September 2023